

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan laut sebagai basis kehidupan sehari-hari bagi rakyat Indonesia. Luas laut yang dimiliki Indonesia adalah 3,25 juta km² dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan memiliki luas lautan yang lebih luas daripada daratan dengan luas yang hanya 2,01 juta km² maka Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Kata maritim berasal dari Bahasa Inggris yaitu *maritime* yang artinya navigasi atau bahari. Dari kata tersebut kemudian lahir istilah negara maritim. Indonesia memiliki kemewahan dalam sektor kelautan, kekayaan laut Indonesia yang beragam membuat negara asing tertarik untuk menguasai hasil laut Indonesia, sehingga perlu kerja keras baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menjaga laut Indonesia. Keberagaman spesies laut yang dimiliki dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai sebuah kekuatan baru (Hardina, 2015).

Pada level global, jika dilihat dari letak geografis Indonesia yang strategis dan dukungan kekayaan sumber daya alam maritim sebagai sektor basis maka Indonesia dapat menjadi negara inti kemaritiman dunia, sedangkan sektor basis non-maritim bisa mempengaruhi sistem internasional. Pada level regional, sebagai bentuk strategi dalam dinamika ekonomi internasional dan perdagangan regional pemerintah perlu menetapkan pusat-pusat gravitasi ekonomi maritim yang diikuti sektor berbasis komoditas barang dan jasa (Manurung, 2018).

Sektor maritim berperan penting untuk Indonesia bahkan sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Ketika negara ini masih berbetuk kerajaan, Indonesia pernah menguasai laut dunia dengan prioritas pada kontrol dan pengembangan maritim. Pada saat Indonesia berbentuk kerajaan, sektor maritim berberan sampai ke mancanegara. Mundurnya kerajaan yang berbasis maritim seperti Majapahit dan Sriwijaya berdampak pada mundurnya peran Indonesia bagi mancanegara dalam sektor maritim. Perkembangan sektor martim di Indonesia semakin mengalami penurunan pada saat masuknya negara barat seperti Portugis, Spanyol dan Belanda. (Nainggolan, Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya, 2015).

Pada masa pemerintahan Soekarno isu maritim sudah pernah diangkat, melalui pidatonya, yaitu: “ ... usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.” Laut juga menjadi salah satu kekayaan Indonesia yang ingin dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno. Namun saat terjadi Deklarasi Djuanda di era Pemerintahan Soekarno, Indonesia belum mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga sektor maritim tidak memperoleh perhatian yang serius sampai dimasa orde baru. Begitupula pada masa pemerintahan Soeharto , sektor maritim tidak masuk dalam penyusunan kebijakan pemerintahan. Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya kondisi keterbelakangan dari berbagai pulau terutama pulau-pulau kecil dan perbatasan akibat dari kemunduran sektor maritim (Nainggolan, Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya, 2015). Memasuki era pemerintahan Habibie, sektor maritim mulai diperhatikan dengan adanya introduksi kembali mengenai Poros Maritim Dunia. Presiden Habibie pertama kalinya mengangkat Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan laut guna menunjang kebijakannya dalam sektor keamanan maritime. Masa pemerintahan dilanjutkan dengan kepemimpinan Abdurahman Wahid, dibawah kepemimpinannya sektor maritim semakin diperhatikan hal ini ditunjukkan dengan diangkatnya menteri sektor kelautan dan perikanan. Pada era pemerintahan Megawati Soekarno Putri kembali memberi perhatian khusus terhadap deklarasi Djuanda untuk meningkatkan sektor maritim di Indonesia (Nainggolan, Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya, 2015). Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan luar negeri yang terkait dengan visi misi politik luar negeri Jokowi yaitu Poros Maritim Dunia. Presiden SBY membuat gagasan terkait *blue economy* untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan konektivitas maritim (ES, 2014).

Poros Maritim Dunia kembali dikenalkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut pada awalnya disampaikan pada saat kampanye Presiden Jokowi pada tahun 2014. Indonesia memiliki peluang ditengah kekutan geopolitik yang bergeser dari dunia Barat ke Asia untuk meningkatkan posisi globalnya. Poros Maritim Dunia menjadi salah satu politik luar

negeri Indonesia di pemerintahan Joko Widodo. Reorientasi politik luar negeri Indonesia di pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak lepas dari pengaruh politik luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat selama 10 tahun masa pemerintahan. Politik luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki karakteristik yang berorientasi pada global dan regional (Yani Y. M., *Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy*, 2009). Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia aktif di forum-forum Internasional seperti Association of South East Asia Nations (ASEAN), G20, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), World Trade Organization (WTO), dan forum Millennium Development Goals (MDGs) (Madu, *Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014 – 2019*, 2014). Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi tidak dengan mutlak meninggalkan konsep kerjasama era SBY, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi juga menjadikan kerjasama melalui peran diplomasi dalam memperluas jangkauan kerjasama internasional dan keterlibatan Indonesia dalam dunia Internasional. Dalam berbagai kesempatan forum multilateral seperti APEC, IORA, G20, East Asian Summit Jokowi sering mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi untuk menjalankan kerjasama dalam mewujudkan politik luar negeri Indonesia (Rosyidin, 2019).

Pada periode pertamanya Presiden Joko Widodo menyusun Politik Luar Negeri Indonesia dengan target menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sebagai negara yang memiliki identitas kekuatan maritim diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, hal tersebut yang menjadi landasan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi tersebut didasari pada posisi geostrategis Indonesia pada persimpangan jalur perdagangan dunia yang dikenal dengan posisi supra strategis. Jalur perdagangan yang melibatkan Indonesia adalah antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, antara Asia Barat dengan Asia Timur, Selat Malaka yang membentang antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, dan merupakan jalur utama perdagangan dari dan ke Asia. Jalur tersebut berfungsi sebagai rute utama pasokan komoditas minyak ke Asia, khususnya ke Asia Timur, rute ini menjadi penting karena merupakan rute laut terpendek antara pemasok Afrika dan Teluk Persia dan pasar Asia. Posisi geostrategis Indonesia tersebut membuka peluang Indonesia menjadi negara hubungan dan kawasan jasa kelautan yang berpengaruh dalam perdagangan dunia. Kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Evan A. Laksmiana, 2018).

Jokowi pada pidato pelantikannya di periode kemenangan pertama tahun 2014 menegaskan bahwa diplomasi maritim harus dilakukan dengan tujuan utama adalah *Jalesveva Jayamahe*, yaitu ”..... *Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga. Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya.*” (Movanita, 2014) Dalam dokumen Kebijakan Laut Indonesia pada tahun 2017, lima hal telah diatur dan ditegaskan pemerintah yaitu mengenai: 1) Pengembangan sumber daya manusia dan kelautan, 2) Keamanan maritim, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, 3) Tata kelola dan lembaga kelautan, 4) Pengembangan ekonomi maritim, 5) Manajemen ruang laut dan perlindungan laut, 6) Budaya maritim, 7) Diplomasi maritime. Enam prinsip tambahan yang menjadi dasar Kebijakan Kelautan meliputi; 1) Wawasan Nusantara (*Archipelagic Outlook*), 2) Pembangunan berkelanjutan, 3) *Blue Economy*, 4) Manajemen terintegrasi dan transparan, 5) Partisipasi, 6) Persamaan dan pemerataan (Agastia & Perwita, *Building Maritime Domain Awareness as an Essential Element of Global Maritime Fulcrum: Challenges and Prospect for Indonesia's Maritime Security*, 2018).

Terdapat lima pilar yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritime, melakukan kerjasama dalam bidang maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim (Agus Haryanto, 2016). Langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menerjemahkan pilar-pilar tersebut adalah dengan menjadikan nelayan sebagai pilar utama dalam pengembangan industri perikanan untuk mewujudkan kedaulatan pangan laut, membangun tol laut, pelabuhan laut, pelabuhan logistik, mengembangkan industri perkapalan, serta berupaya meningkatkan pariwisata maritim.

Untuk mewujudkan pilar-pilar tersebut pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya salah satunya dengan bergabung di forum maupun organisasi internasional. Indonesia memiliki kepentingan dalam menjadikan kawasan maritim di Asia Pasifik dan Samudera Hindia sebagai target dari Poros Maritim Dunia. Selain Samudera Pasifik, Indonesia juga berada di wilayah Samudera Hindia, dimana wilayah ini memiliki peran yang strategis terutama untuk ekonomi dunia karena terhubung dengan perdagangan internasional dari Asia ke Eropa dan sebaliknya. Secara geologis Samudera Hindia termasuk dalam golongan laut termuda. Samudera Hindia

merupakan Samudera terbesar ketiga di dunia setelah Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Samudera Hindia juga sebagai penghubung bagi dua Samudera terbesar tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Samudera Hindia sangat menjanjikan dan strategis bila melihat sumber daya alam yang dimiliki. Dengan demikian Samudera Hindia mempunyai dampak atau pengaruh yang menguntungkan terhadap suatu tujuan tertentu bagi negara dalam jangka panjang (Sidik, 2018). Sehingga diperlukannya sebuah organisasi yang menaungi negara-negara di wilayah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.30/2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional yang menjelaskan bahwa keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasional bertujuan untuk sejumlah hal seperti peran dan kinerja Indonesia di forum Internasional, hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dan kepercayaan masyarakat internasional untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. (Hardiyanto, 2019) Berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan organisasi internasional terbagi menjadi Organisasi Internasional Global dan Organisasi Internasional Regional. Organisasi Internasional Global merupakan organisasi yang wilayah kegiatannya bersifat global serta keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup diberbagai penjuru dunia seperti PBB, OKI, dan GNB. Organisasi Internasional Regional merupakan organisasi yang wilayahnya bersifat regional serta keanggotaannya hanya bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja seperti ASEAN, IORA dan APEC (Dewi, 2013).

Organisasi regional yang ada di wilayah Samudera Hindia adalah Indian Ocean Rim Association (IORA). Dalam sistem kerjanya IORA melakukan pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan melalui pendekatan konsensus antar negara anggota. Pilar-pilar yang mendasari berdirinya IORA yaitu dalam aspek ekonomi, keamanan dan keselamatan maritim, serta pendidikan dan kebudayaan (Indian Ocean Rim Association, 2019).

Dengan adanya kebijakan Poros Maritim Dunia, Presiden Joko Widodo dinilai bermaksud membawa kembali Samudera Hindia ke dalam “kanvas regional” guna untuk memproyeksikan kekuatan Indonesia. (Evan A. Laksmana, 2018). Kawasan Samudera Hindia merupakan zona damai, bebas, netral serta dapat membawa kemakmuran bagi semua yang akan dicapai melalui IORA. Bergabungnya Indonesia di IORA sebagai bentuk diplomasi maritim Indonesia kepada negara-negara di wilayah Samudera Hindia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Diplomasi Maritim Indonesia di Indian Ocean Rim Association sebagai Perluasan Lingkaran Konsentris Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Mengembangkan Poros Maritim Dunia Di Era Joko Widodo 2014-2019?

C. Kerangka Pemikiran

1. Diplomasi Maritim

Negara yang memiliki sumber daya maritim cenderung akan mengoptimalkan kekuatan maritim. Diplomasi maritim adalah negosiasi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai batas laut, kerjasama maritim dan pertahanan maritim. Menurut Miere diplomasi maritim tidak hanya sebatas membahas tentang pengelolaan dan ketegangan maritim antar negara-negara yang bersangkutan namun juga membahas mengenai pemanfaatan aset maritim dalam mengatur hubungan antar suatu negara dengan negara lain (Sudirman, 2016).

Dalam kaitannya dengan Indonesia, letak geografis dan sumber daya maritim yang dimiliki oleh Indonesia membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 mencoba untuk menekankan kebijakan ke ranah maritim dengan meingkatkan kekuatan maritim. Konsep diplomasi maritim pada abad 21 berbeda dengan konsep diplomasi maritime tradisional yang cenderung menggunakan *hard power*. Diplomasi maritim saat ini menggunakan *soft diplomacy* dalam mencapai kepentingan negara dengan lebih menekankan pada kemampuan dan kapasitas dalam melestasikan sumber daya maritim, memastikan keamanan barang, orang dan jasa yang melewati jalur laut, melindungi merbatasan maritim, dan mencegah penyalahgunaan sumber daya laut (Sanders, 2014). Menurut Christine Le Miere diplomasi maritim terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Diplomasi Kooperatif: Dalam mengimplemetasikan kebijakan maritimnya, diplomasi kooperatif atau kerjasama maritim lebih mengutamakan *soft power* daripada *hard power*. Kegiatan maupun kerjasama maritim yang dilakukan dalam diplomasi maritim meliputi kunjungan antar pelabuhan, latihan bersama, serta penyaluran bantuan dan misi kemanusiaan yang dilakukan pada jalur maritim.
2. Diplomasi Persuasif: diplomasi yang menekankan dalam upaya mendapatkan pengakuan kekuatan maritim dari negara lain. Diplomasi persuasif juga menekankan

pembentukan *prestige* suatu negara di tingkat internasional. Diplomasi jenis ini bukan untuk menunjukkan langsung kekuatan maritimnya dan bukan sebagai ancaman kepada lawannya, namun tujuan dari diplomasi persuasif untuk meyakinkan negara lain terkait efektivitas, kekuatan serta kapabilitas keberadaan angkatan militer dan sumber daya maritim yang dimiliki negaranya.

3. Diplomasi koersif disebut juga sebagai *gunboat diplomacy*. Diplomasi jenis ini menggunakan hard power karena melakukan penekanan kepada pihak lawannya dengan memanfaatkan kekuatan angkatan laut (Prasetya, Diplomasi Maritim Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA): Peluang dan Tantangan, 2018).

Dalam melakukan diplomasi maritimnya pemerintah Joko Widodo menggunakan *soft diplomacy* dengan jenis diplomasi maritim kooperatif dan persuasif. Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan kebijakan maritimnya tersebut juga melakukan upaya kooperasi, kolaborasi, *multi-stakeholder partnership* dalam menjalankan hubungan dengan negara lain terkait kemaritiman (Prasetya, Diplomasi Maritim Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA): Peluang dan Tantangan, 2018). Presiden Joko Widodo juga menggunakan peran organisasi internasional dalam mendukung diplomasi maritim yang bersifat multilateral. Konsep diplomasi maritim dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan cara Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia di IORA sebagai organisasi internasional yang membawahi permasalahan dan kerjasama kemaritiman. Sehingga nantinya konsep ini dapat menjawab permasalahan yang diusung peneliti dalam konteks diplomasi maritim.

2. Konsep Lingkaran Konsentris

Politik Luar Negeri suatu negara berdasarkan dari suatu kepentingan nasional yang disusun menjadi kebijakan-kebijakan negara dalam menjalankan politik luar negerinya. Indonesia, dalam menjalankan politik luar negeri menggunakan lingkaran konsentris. Pertama kali lingkaran konsentris dicetuskan oleh Ali Alatas yang merupakan menteri Luar Negeri Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Menurut Ali Alatas, lingkaran konsentris merupakan alat yang dapat membantu suatu negara dalam menganalisis suatu masalah maupun isu serta menempatkan suatu negara pada posisi yang strategis dalam menghadapi permasalahan yang ada. Terkait dengan politik luar negeri menurut Jenderal Soemitro Politik Luar Negeri

Indonesia yang sebelumnya berorientasi ke dalam dan tertutup harus berubah menjadi lebih berorientasi keluar di dunia hubungan internasional, hal ini selaras dengan Lingkaran Konsentris. Kemudian menurut Zulfikar lingkaran konsentris mempunyai tiga dimensi, yaitu (Irhamna, 2020):

- A. Dimensi regional: Politik luar negeri yang berdasarkan pada letak geografis dalam kepentingan regional maupun internasional
- B. Dimensi organisasional: Politik luar negeri yang dilihat dari peran Indonesia sebagai anggota dalam organisasi internasional dan dalam hubungan internasional lainnya.
- C. Dimensi fungsional: Politik luar negeri yang dilihat dari fungsi Indonesia dalam tatanan internasional

Menurut peneliti lingkaran konsentris dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam melakukan hubungan internasional, dengan menggunakan konsep ini Indonesia dapat memutuskan regional mana yang menjadi prioritas Indonesia dalam politik luar negeri tanpa harus menyebabkan konflik dan tetap aktif dalam dunia internasional. Dalam penulisan skripsi ini menyebutkan bahwa Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia salah satunya dapat menjadikan negara-negara di wilayah Samudera Hindia sebagai prioritas dengan bergabung di IORA.

D. Argumentasi

1. Dengan menggunakan diplomasi maritim secara kooperatif dan persuasif menurut Christine Le Miere, penelitian ini memiliki argument bahwa melalui diplomasi maritim, kebijakan luar negeri perlu ditindaklanjuti untuk mencapai kepentingan nasional yaitu Poros Maritim Dunia. Bergabungnya Indonesia di IORA menjadi sarana bagi Indonesia dalam melakukan diplomasi maritim ke negara-negara anggota IORA dan terlibat dalam isu maritim, ekonomi serta sosial yang menjadi arah kebijakan IORA untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
2. Konsep lingkaran konsentris dapat membantu Indonesia dalam mengidentifikasi suatu organisasi ataupun negara-negara yang paling berpotensi untuk diajak kerjasama melalui dimensi regional, organisasional, dan fungsional. Dengan menggunakan konsep lingkaran konsentris peneliti berpandangan bahwa Indonesia dapat menjadikan IORA yang menaungi negara-negara kawasan Samudera Hindia sebagai fokus perluasan politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia.

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya Indonesia sebagai perluasan lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia dalam memenuhi target menjadi Poros Maritim Dunia melalui diplomasi maritim di IORA dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2019.
2. Penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Studi Literatur yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas. Penulis memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku, web, jurnal, artikel, berita atau peneliti terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pembahasan dan analisa akan berdasarkan kumpulan fakta yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan menggunakan konsep yang ada.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penelitian ini, peneliti akan membatasi topik pada upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam politik luar negerinya untuk mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia melalui IORA dan keefektifan penggunaan startegi yang dipakai dalam diplomasi Indonesia dengan batasan konsep diplomasi maritim dan lingkaran konsentris. Penelitian ini akan membatasi secara waktu yaitu selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo ditahun 2014-2019.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas arah pembahasan pada skripsi ini, maka penulis membagi lima bab bahasan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian, dan sistematikan penulisan.
- BAB II Membahas tentang pergeseran politik luar negeri Indonesia di era Joko Widodo.
- BAB III Revitalisasi Indonesia sebagai negara maritim melalui Poros Maritim Dunia
- BAB IV Membahas mengenai diplomasi maritim Indonesia melalui Indian Ocean Rim Association
- BAB V Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.